

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). In *Alfa Beta*. https://www.academia.edu/34144467/Dasar-dasar_Kebijakan_Publik_Edisi_Revisi_.pdf
- Agusyanti, C., & Sujianto, S. (2023). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Pekanbaru. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2), 59–71. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1212>
- Ahmad, H., Aisyah, S. N., Tinggi, S., & Nasional, P. (2020). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Jurnal Tunas Agraria*, 3(3).
- Aisyah, A., Susmiyati, H. R., & Al-Hidayah, R. (2020). Implementasi Asas Sederhana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Menjamin Hak Keperdataan. *Petitum*, 8(2), 131–142. <https://doi.org/10.36090/jh.v8i2.813>
- Atika, S., & Aminullah. (2024). KUALITAS PELAYANAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN PASURUAN (STUDI DI DESA REMBANG KECAMATAN REMBANG). *Triwikrama Jurnal Ilmu Sosial*, 4(12). <https://doi.org/https://doi.org/10.6578/triwikrama.v4i12.5916>
- Ayuningtyas, D. (2014). *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik*. Raja Grafindo Persada.
- Azhar, S. (2018). *Sistem Informasi Akuntansi*. Lingga Jaya.
- Boedi, H. (2003). *Hukum Agraria Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan.
- Daryanto, & Setyobudi, I. (2014). *Konsumen dan pelayanan prima*. Gava Media.
- Febrianti, S., & Rekno, S. (2019). Efektivitas Peran Public Relations Petugas Pelayanan Pada Kepuasan Masyarakat Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. *Jurnal Egaliter*.
- Hamidah, R. I., Santoso, R. S., & Suwitri, S. (2024). *EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT (PTSL+PM) PADA TAHUN 2022*. Universitas Diponegoro.
- Handayani, A. A., & Yusriyadi. (2019). Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *Notarius*, 12(1), 537–549.

- Hermit, H. (2004). *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara Dan Tanah Penda : Teori Dan Praktek Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Mandar Maju.
- Huda, N., & Wandebori, H. (2021). Problematika Transformasi Sertifikasi Tanah Digital. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 1, 17–28. <https://doi.org/10.31292/jm.v1i1.7>
- Khoeron. (2019). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Kurniawan, A., Sudibyanung, M., & Supriyanti, T. (2020). Pemanfaatan Sertifikat Tanah Hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk Peningkatan Modal Usaha Di Kabupaten Madiun. *Tunas Agraria*, 3(3). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.124>
- Larasati, I. D. (2020). *PELAKSANAAN ASAS TERJANGKAU DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO*. Universitas Sebelas Maret.
- Litman, T. (2021). Evaluating Accessibility for Transport Planning. Measuring People's Ability to Reach Desired Service and Activities. *Victoria Transport Policy Institute, September*, 62. <https://www.vtppi.org/access.pdf>
- Marlinah, A. (2017). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderating (Studi pada Kantor SAMSAT Wilayah I Kota Makassar). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi*, 2(3), 487–493.
- Masnah, Lukman, S., & Muhi, A. H. (2021). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Renaissance*, 6(2), 783. <https://doi.org/10.53878/jr.v6i2.150>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2019). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed). In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). Sage. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Milgram, S. (1963). Behavioral Study of obedience. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4), 371–378. <https://doi.org/10.1037/h0040525>
- Mola, T. (2018). *Program Prioritas, Ini Target Jumlah Sertifikasi Tanah*. *Bisnis.Com*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20180323/15/753705/program->

prioritas-ini-target-jumlah-sertifikasi-tanah

- Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4(1). <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217>
- Mulyana, D. (2014). Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Cetakan ke 18. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Najiha, N. (2023). IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KOTA MALANG (Studi pada Badan Pertanahan Nasional Kota Malang). In *Public Sphere Review*. <https://doi.org/10.30649/psr.v2i1.82>
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). Metodologi Riset Hukum. In Oase Pustaka (Ed.), *ase Pustaka* (Vol. 2). https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit_Sapto_Nugroho/URL_Buku_Ajar/Buku_Metodologi_Riset_Hukum.pdf
- Nurkasih, R. R., Sulaiman, & Yusuf, A. (2016). Pengaruh Konflik Peran, Komitmen Organisasi, Pemahaman Good Governance dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi NTT. *Jurnal Akutansi*, 3(3), 1–16.
- Oktavio, W. P. (2022). Penerapan Asas Publisitas Pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat. *Unes Law Review*, 5(1), 138–151. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1%0Ahttps://review-unes.com/index.php/law/article/view/299>
- Pemerintah Desa Banjarsari Wetan. (2017). Wilayah Desa. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2024 di laman <http://banjarsariwetan.desa.id/page/7299/wilayah-desa>.
- Pemerintah Kabupaten Banyumas. (2024). Visi, Misi, dan Moto. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2024 di laman <https://kab-banyumas.atrbpn.go.id/menu/detail/14225/visi-misi--moto>.
- Pemerintah Kecamatan Sumbang. (2017). Letak Geografis. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2024 di laman <https://sumbangkec.banyumaskab.go.id/page/2936/letak-geografis>.
- Pemerintah Indonesia. Ketetapan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 63. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Pemerintah Indonesia. Pasal 19 Ayat (2) UUPA (Undang Undang Pokok Agraria) Tahun 1960 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara RI Tahun 1960 Pasal 19. Sekretariat Negara. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertipikat Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 1. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 6. sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 12. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 24. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Sifat Pembuktian sertipikat Tanah Sebagai Tanda Bukti Hak. Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 24. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. Undang Dasar 1945 dalam pasal 33 ayat (3) tentang Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lembaran Negara RI Tahun 1945 Pasal 33. Sekretariat Negara. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 5. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 5. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Pemerintah Indonesia. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 22. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang direvisi dengan UU Nomor 32 tahun 2004. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 25, Tambahan Lembaran RI Tahun 2004 Nomor 32. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pandian, B. (2010). Approaches in Public Administration. *Illumination IAS*.
- Pradana, A. Y. (2017). *Implementasi Penetapan Biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Tingkat Kota/Kabupaten*. 2588–2593.
- Prayitno, R. R. (2017). Hambatan dan Kendala Serta Solusi PTSL 2017 di D.I. Yogyakarta. *Prosiding Seminar Nasional Percepatan Pendaftaran Tanah Di Indonesia: Tantangan Pelaksanaan PTSL Dan Respon Solusinya*.
- Putri, Y. T. H. (2019). *PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS IMPLEMENTATION OF LAND REGISTRATION IN COMPLETE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION PROGRAM (PTSL) IN KELURAHAN GONDRONG , TANGERANG CITY*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Rahmanto, E. S. (2022). *EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM PEMEGANG HAK DI WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Rahmawati, N. (2022). Pendaftaran Tanah Berbasis Desa Lengkap. *Tunas Agraria*, 5(2), 127–141. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.177>
- Saifuddin, S. S., & Qamariyanti, Y. (2022). Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah atas Terbitnya Surat Keterangan Tanah pada Objek Tanah yang sama. *Notary Law Journal*, 1(1), 31–48. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i1.2>
- Santoso, U. (2012). *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. PT Fajar Interpramata Mandiri.
- Saputro, H. E. (2015). Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Professional FIS UNIVED*, 2(1).
- Setiawan, R. A. (2014). *Analisis Pengaruh Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus: Waroeng Spesial Sambal cabang Gonilan - Surakarta)*. Universitas Islam Lamongan.

- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabet.
- Sujarwo. (2024). *245 Sertifikat Tanah Program PTSL+PM Desa Banjarsari Wetan Tahap I Diserahkan*. RRI.Com. <https://www.rri.co.id/purwokerto/daerah/696637/245-sertifikat-tanah-program-pts-l-pm-desa-banjarsari-wetan-tahap-i-diserahkan>
- Sumardjono, M. S. (2010). *Tanah Untuk Kesejahteraan Rakyat, Penerbit Bagian Hukum Agraria*. UGM Press.
- Supaat. (2021). *HUT ke 61 UUPA, Tanah Di Banyumas Yang Terdaftar Baru 48,7 Persen*. Banyumaskab.Go.Id. <https://www.banyumaskab.go.id/read/34621/hut-ke-61-uupa-tanah-di-banyumas-yang-terdaftar-baru-487-persen>
- Suprpta, A., & Cahyo, H. (2024). *PTSL Kabupaten Banyumas Targetkan 36.400 Sertifikat Terbit pada 2024*. RRI.Com. <https://www.rri.co.id/daerah/531528/pts-l-kabupaten-banyumas-targetkan-36-400-sertifikat-terbit-pada-2024>
- Tjiptono, F. (2022). *SERVICE MANAGEMENT: Mewujudkan Layanan Prima Edisi 4*. Penerbit Andi.
- Vincent, G. (2011). *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. PT. Elex Media Komputindo.
- Wibiningtyas, R. A., & Subekti, R. (2021). Penerapan Asas Terbuka Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9 (3), 743–754. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/38542>
- Zatira, A. R., & Thamrin, M. H. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Professional*, vol.9 No.2(2), 383–392.